

2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Cirebon disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan Anggaran Daerah dalam pelaksanaannya yang diwujudkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selain berfungsi sebagai alat kendali dan merupakan instrumen penilaian kualitas kinerja serta media pertanggungjawaban kepada publik, LKIP 2020 ini juga memuat informasi tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil berupa program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran guna mewujudkan salah satu misi pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yaitu “ **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan** ” sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2018 – 2023.

Harapan kami pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon, dalam menghadapi berbagai tantangan kiranya mampu memanfaatkan potensi yang ada sehingga dapat melaksanakan perannya secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi. Mudah-mudahan segala harapan tersebut mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT.

Cirebon, Januari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIREBON

Drs. ANDI ARMAWAN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691214 199003 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan kewenangannya, Dinas Perhubungan Kota Cirebon berupaya untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai. Salah satu aspek penting yang harus diimplimentasikan dalam mewujudkan *Good Governance* adalah akuntabilitas. Didalam akuntabilitas kinerja haruslah menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan. Akuntabilitas kinerja organisasi diukur berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang harus memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, maka LKIP selain sebagai alat untuk melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja, digunakan juga sebagai sarana strategis untuk melakukan evaluasi internal organisasi. Dengan berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan ini, maka diharapkan agar setiap organisasi perangkat daerah dapat terus melakukan perbaikan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Tahun 2020 merupakan tahun transisi dalam pelaksanaan Renstra dan RPJMD 2018 – 2023, sehingga perlu adanya penyesuaian tujuan, sasaran, dan indikator-indikator sasaran yang mengalami perubahan dari periode sebelumnya. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2018 – 2023.

Pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Misi ke-3 **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan”** Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja utama

untuk Sasaran 1 Dinas Perhubungan yaitu Menurunnya titik rawan kemacetan lalu lintas, realisasi Tahun 2020 adalah sebesar 4 titik dari target 4 titik dengan prosentase pencapaian sebesar 100%. Untuk Sasaran 2 Dinas Perhubungan yaitu Tersedianya angkutan umum masal yang ramah lingkungan, realisasi Tahun 2020 adalah 10 unit dari target sebesar 7 unit dengan prosentase sebesar 143 %. Untuk Sasaran 3 Dinas Perhubungan yaitu Meningkatnya kinerja pelayanan publik, realisasi Tahun 2020 adalah 88,24 % dari target sebesar 85 % dengan prosentase sebesar 103,81 %.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2020 Dinas Perhungan didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 27.069.298.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 25.973.261.926** dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar **95,95 %** dengan rincian :

- a. Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai) sebesar **Rp. 13.253.287.000** dengan realisasi sebesar **Rp. 12.384.480.925** (tingkat capaian **93,44%**)
- b. Anggaran Belanja Langsung (Kegiatan) sebesar **Rp 13.816.011.000** dengan realisasi sebesar **Rp 13.588.181.001** (tingkat capaian **98,36%**)

DAFTAR ISI

CCOVER.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
Drs. ANDI ARMAWAN.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
1.1 LATAR BELAKANG.....	6
1.2 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON... 7	7
a. Tugas Pokok.....	7
b. Fungsi.....	7
c. Struktur Organisasi.....	7
1.3 ISU – ISU STRATEGIS.....	26
1.4 Inovasi Dalam Penyelenggaraan Tugas.....	26
BAB II	29
PERENCANAAN KINERJA	29
2.1. Rencana Strategis.....	29
2.2 Arah Kebijakan.....	31
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	34
2.4 Perjanjian Kinerja.....	35
2.5 Rencana Anggaran.....	35
BAB III	43
AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	43
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.....	43
3.1.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	44
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	55
3.2.1 Realisasi Anggaran.....	55
BAB IV	84
PENUTUP	84

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang wajib dibuat oleh penyelenggara negara termasuk Satuan Kerja Instansi Pemerintah Daerah (SKPD). SAKIP dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh SKPD termasuk Dinas Perhubungan diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun. Untuk periode tahunan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selanjutnya DPA tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun Perjanjian Kinerja SKPD.

Laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai SKPD berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang wajib disusun setiap akhir tahun termasuk oleh Dinas Perhubungan.

1.2 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Dinas Perhubungan Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Sedangkan Dasar Hukum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon adalah Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

c. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

a. Unsur Organisasi

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- 1) unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- 2) unsur staf adalah Sekretaris;

- 3) pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- 4) unsur lini adalah Kepala Bidang;
- 5) pembantu unsur lini adalah kepala Seksi;
- 6) UPT; dan
- 7) pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - c. Seksi Prasarana Lalu Lintas.
4. Bidang Angkutan dan Multimoda, terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
 - c. Seksi Terminal dan Multimoda.
5. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana, terdiri dari:
 - a. Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
 - b. Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Operasional.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Tugas dan Unsur Organisasi

A. Kepala Dinas

1. Tugas pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

2. Fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dinas operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas;
- 3) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

B. Sekretariat

1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan administratif Dinas

2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian;

- c. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang perhubungan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- g. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretariat membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Tugas Pokok

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

(2) Fungsi

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan,

- kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

(1) Tugas Pokok

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

(2) Fungsi

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
- c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk

- penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang Perhubungan;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- f. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- g. penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Lalu Lintas

1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan bidang lalu lintas.

2. Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan

publik dalam lingkup Bidang Lalu Lintas;

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Lalu Lintas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas penyelenggaraan manajemen lalu lintas.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi

Manajemen Lalu Lintas;

- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan rekayasa lalu lintas.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi

Rekayasa Lalu Lintas;

g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan

h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Prasarana Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Prasarana Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan prasarana lalu lintas.

(2) Fungsi

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;

b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;

c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana Lalu Lintas;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana Lalu Lintas;

e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana Lalu Lintas;

g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas; dan

- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

D. Bidang Angkutan dan Multimoda

1. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan angkutan dan multimoda.

2. Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Bidang Angkutan dan Multimoda, membawahkan:

a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek

(1) Tugas Pokok

Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan angkutan dalam trayek.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek; dan;
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang

(1) Tugas Pokok

Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang

lingkup Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan

h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Terminal dan Multimoda

(1) Tugas Pokok

Seksi Terminal dan Multimoda sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan terminal dan multimoda.

(2) Fungsi

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda;

b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda;

c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;

e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;

g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda; dan

- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

E. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana

1. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan keselamatan dan tehnik sarana.

2. Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana, membawahkan:

a. Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan

(1) Tugas Pokok

Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan audit dan investigasi keselamatan.

(2) Fungsi

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;

b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;

c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;

e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;

g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan; dan

h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Penyuluhan Keselamatan

(1) Tugas Pokok

Seksi Penyuluhan Keselamatan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyuluhan keselamatan.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyuluhan Keselamatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyuluhan Keselamatan;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyuluhan Keselamatan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Pengendalian dan Operasional

(1) Tugas Pokok

Seksi Pengendalian dan Operasional sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengendalian dan operasional.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Seksi Pengendalian dan Operasional;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Seksi Pengendalian dan Operasional;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian dan Operasional;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

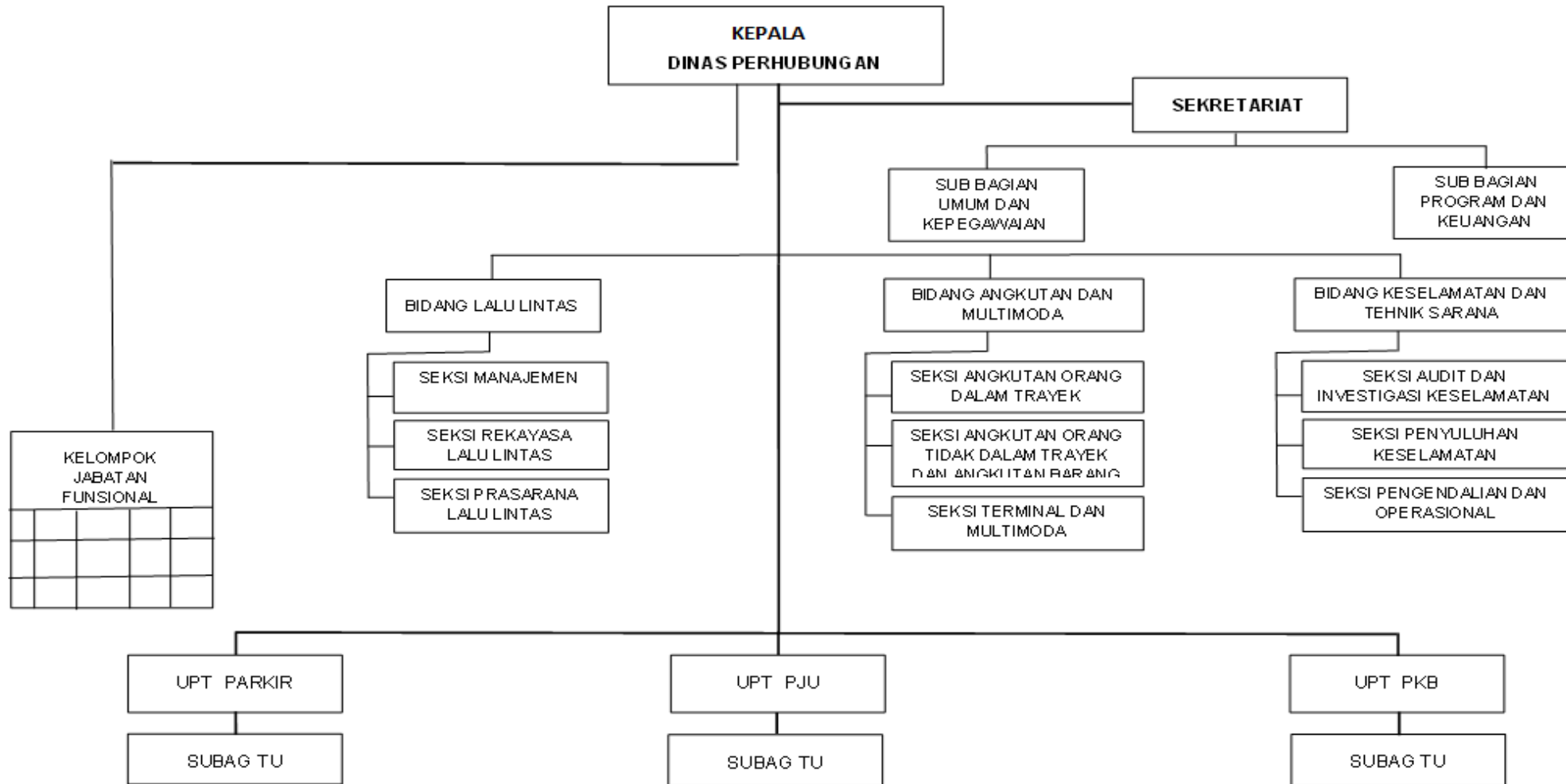
F. Unit Pelayanan Teknis (UPT)

- a. UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- b. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- d. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- e. Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- f. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON



Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

1.3 ISU – ISU STRATEGIS

Beberapa isu penting di Dinas Perhubungan Kota Cirebon, diantaranya adalah :

1. Pengembangan Taman Edukasi Lalu Lintas;
2. Pengembangan ATCS;
3. Peningkatan Kualitas SDM Dinas Perhubungan yang Handal dan Profesional;
4. Kesemerawutan Lalu Lintas pada ruas - ruas jalan CBD;
5. Perlintasan Kereta Api Sebidang;
6. Angkutan Massal Perkotaan;
7. Adanya angkutan umum berbasis aplikasi (online);
8. Aksesibilitas Transportasi Bandara Kertajati;
9. Pengaturan Angkutan Barang Dalam Kota;

1.4 Inovasi Dalam Penyelenggaraan Tugas

Inovasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon :

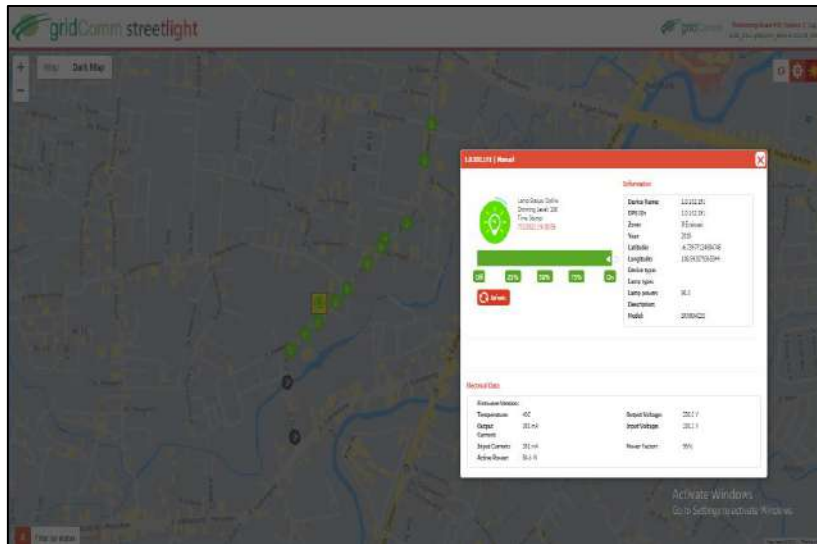
1. Smart Card Uji Kir

Kartu yang di peruntukan untuk pengguna kendaraan wajib KIR sebagai pengganti dari buku uji KIR.

2. Smart PJU

Pembaruan penggunaan lampu PJU dengan lampu Light Emitting Diode (LED) dapat memudahkan dalam pengontrolan penggunaan lampu Pju di Kota Cirebon, aplikasi yang digunakan inilah yang dinamakan Smart PJU.

Smart PJU berbentuk website yang hanya dapat di akses oleh Ka UPT PJU Dinas Perhubungan Kota Cirebon, yang berfungsi untuk mengetahui jumlah lampu PJU yang mati dan hidup serta dapat mengontrol daya Lampu PJU di Kota Cirebon sehingga dapat memudahkan UPT PJU dalam memberikan layanan untuk masyarakat.



Gambar 1.2 Aplikasi Smart PJU

3. Parkir Non Tunai QRIS

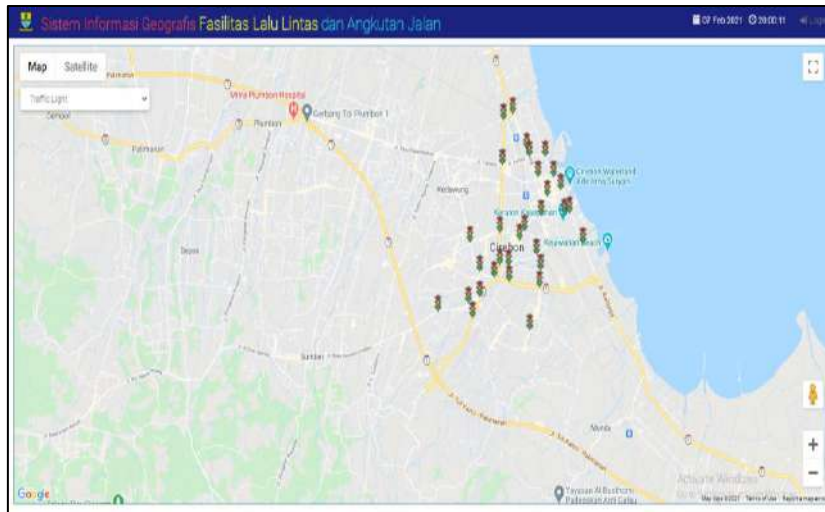
Adalah bentuk pembayaran parkir secara non tunai (gopay, ovo, shopeepay, dll) yang sudah diterapkan pada jalan pagongan, dan nanti kedepannya akan diterapkan di seluruh kantong parkir di Kota Cirebon.



Gambar 1.3 Aplikasi QRIS

4. Sistem Informasi Geografis Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Adalah website yang bisa diakses masyarakat untuk mengetahui informasi terkait fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan di ruas jalan Kota Cirebon. <http://sigflaj.cirebonkota.go.id/>



Gambar I.4 Tampilan Website SIGFLAJ

5. ATCS (Area Traffic Control System)

Pengendalian lalu lintas di persimpangan Kota Cirebon secara terpusat pada ruang kendali di Dinas Perhubungan Kota Cirebon melalui CCTV yang terpasang di beberapa persimpangan di Kota Cirebon.



Gambar I.5 Pantauan lalu lintas melalui ATCS

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Cirebon, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan. Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018 - 2023. Visi dan Misi Walikota Cirebon:

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Sesuai dengan arah kebijakan Kota Cirebon 2018 - 2023 maka seluruh Perangkat Daerah diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi Misi Kota Cirebon tahun 2018 - 2023, dimana Visi Kota Cirebon selama 5 tahun adalah

**“SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis
Budaya dan Sejarah”**

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. misi dapat juga didefinisikan sebagai penjabaran suatu visi dimana dibuat dengan lebih lengkap sehingga dapat dipahami setiap orang yang membacanya. Sedangkan misi yang ditetapkan walikota Cirebon berdasarkan visi tersebut adalah :

- 1) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, Unggul dalam Segala Bidang;
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif;
- 3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan;
- 4) Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang kondusif;

Dan untuk Dinas Perhubungan Kota Cirebon mengacu pada visi misi diatas maka yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan urusan Perhubungan Kota Cirebon terdapat 1 (satu) rumusan Misi Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 - 2023 yang ada relevansi dan keterkaitannya Untuk mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon yaitu Misi ke 3 sebagai berikut :

Tabel II.1
Sasaran dan Indikator
Dinas Perhubungan Kota Cirebon
Tahun 2020

Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra DISHUB	Indikator Kinerja Utama	2020
<i>Misi Ke-3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan.</i>			
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan	Menurunnya titik rawan kemacetan lalu lintas	Jumlah rawan titik kemacetan	4 titik
Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat	Tersedianya angkutan umum massal yang ramah lingkungan	Rasio jumlah armada yang ramah lingkungan terhadap jumlah armada	7 unit
	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	85 %

Tabel diatas menjelaskan bahwa apa yang menjadi sasaran dan indikator Dinas Perhubungan Kota Cirebon digunakan untuk mendukung visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Cirebon sehingga dapat berjalan selaras dengan apa yang menjadi visi dan misi ke-3 Kota Cirebon.

2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perhubungan agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan cakupan pelayanan perhubungan.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Dinas Perhubungan Kota Cirebon

VISI : "SEHATI KITA WUJUDKAN KOTA CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN SEJARAH

MISI I : "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan"

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat	Tersedianya Angkutan Umum Masal Yang Ramah Lingkungan	Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan	tinggi dan tepat guna, membangun sistem angkutan massal, meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui peremajaan armada bus sedang, penambahan dan penataan trayek, penataan tempat pemberhentian angkutan umum serta pelayanan hari-hari besar

MISI II: "Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif"

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Optimalisasi rekayasa, sosialisasi dan pengendalian lalu lintas dalam rangka	Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian dan pengamanan lalu
		Mengoptimalkan standar keselamatan lalu lintas	Menerapkan standar pengujian kendaraan bermotor
		Menata sistem perpajakan yang sudah ada serta menyediakan fasilitas parkir	Penerapan / perubahan geometris sistem parkir, penerapan sistem perparkiran

2.3 Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kota Cirebon melalui Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Utama (IKU). Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2019-2023. Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	2019	2020	2021	2022	2023	Sumber Data	Keterangan
Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra SKPD								
Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Satuan	Nilai C	Nilai C	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Renstra 2019 - 2023 Dishub Kota Cirebon	
		Jumlah Titik Rawan Kemacetan	5 titik	4 titik	3 titik	2 titik	1 titik	Renstra 2019 - 2023 Dishub Kota Cirebon	
Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat	Tersedianya Angkutan Umum Masal Yang Ramah Lingkungan	Tingkat Penggunaan Angkutan Umum (Moda Share)	40%	50%	60%	70%	80%	Renstra 2019 - 2023 Dishub Kota Cirebon	
		Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	5 unit	7 unit	8 unit	9 unit	10 unit	Renstra 2019 - 2023 Dishub Kota Cirebon	

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Tahun 2020 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra DISHUB dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah disusun maka untuk mewujudkan hal tersebut dituangkan melalui rencana program dan kegiatan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Adapun uraian perjanjian kinerja DISHUB Tahun 2020 tersebut sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Perjanjian Kinerja DISHUB Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Jumlah Titik Rawan Kemacetan Dari 5 Titik Menjadi 4 Titik	4 titik
2	Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah Lingkungan	Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	7 unit
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020

2.5 Rencana Anggaran

Untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaiannya pada tahun 2020, pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DISHUB Kota Cirebon tahun 2020:

Tabel 2.5

Rencana Anggaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan		Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Satuan	Nilai C			
	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Jumlah Titik Rawan Kemacetan	4 titik			
		-Tersedianya Pedoman/arahan untuk penanganan daerah rawan kemacetan (Kep.Kadis)	100 %	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 15.410.000	Rp. 15.410.000
		-Rekomendasi terhadap kegiatan peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %			
		Dokumen laporan forum LLAJ sebagai tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, inventori bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	2 buku	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 15.410.000	Rp. 15.410.000
		Tercapainya standarisasi alat uji kendaraan bermotor	100 %	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 75.000.000	Rp. 25.000.000
Berfungsinya kestabilan dan akurasi alat uji kendaraan bermotor sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	100 %	Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000	Rp. 25.000.000		

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah rambu yg disediakan / jumlah rambu yg dibutuhkan (standar) x 100% - Jumlah APILL yg disediakan / jumlah APILL yg dibutuhkan (standar) x 100% - Jumlah PJU yg disediakan / jumlah PJU yg dibutuhkan (standar) x 100% 	<p>85 %</p> <p>85 %</p> <p>85 %</p>	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 5.173.493.000	Rp. 1.447.197.000
		- Tersedianya pengadaan rambu-rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	52 buah	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Rp. 165.000.000	Rp. 0
		- Papan informasi tarif parkir	18 buah			
		Berfungsinya traffic light untuk menunjang keselamatan dan kelancaraan lalu lintas	3 paket	Perbaikan Lampu Isyarat Pengatur Lalu Lintas (Traffic Light)	Rp, 375.000.000	Rp. 135.800.000
		Terwujudnya pemasangan PJU di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan	50 titik	Penataan dan Pembangunan PJU	Rp. 173.200,000	Rp. 0
		Terwujudnya PJU yang berfungsi secara keseluruhan	6.589 titik	Pemeliharaan PJU	Rp. 1.286.392.000	Rp. 981.807.000
		Berfungsinya rambu lalu lintas dan marka jalan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	550 m2	Pemeliharaan Marka dan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Rp. 148.000.000	Rp. 0
		Menekan tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan (operasi penertiban gabungan dengan polisi)	1 tahun	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Rp. 140.500.000	Rp. 140.500.000

		Dokumen lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan (WTN)	1 dokumen	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 125.000.000	Rp. 0
		Pemilihan pelajar pelopor keselamatan untuk tingkat SMA/SMK se wilayah Kota Cirebon	3 orang	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Rp. 50.000.000	Rp. 0
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Terfasilitasnya pelayanan ATCS dan amdalalin dinas perhubungan kota cirebon	2 orang 1 dokumen	Penyediaan Jasa Pelayanan Automatic Trafic Control System dan Analisis Manajemen Dampak Lalu Lintas	Rp. 243.790.000	Rp. 189.090.000
		Rambu lalu lintas jenis F Rambu pendahulu petunjuk jalan	75 buah 20 buah	Pengadaan Rambu Lalu Lintas (BANGUB)	Rp. 786.537.000	Rp. 0
		Pemasangan jaringan PJU di wilayah kota Cirebon Belanja lampu LED smart PJU	1 paket 111 buah	Penataan dan Pembangunan PJU (BANGUB)	Rp. 1.298.060.000	Rp. 0
		Meningkatnya pendapatan dari retribusi parkir	77,11 %	Program Peningkatan Pelayanan Parkir	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
		Terselenggaranya pelayanan unit pelayanan teknis perparkiran yang optimal	1 tahun	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Perparkiran	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
Meningkatkan Layanan Sarana Angkuta Umum Masyarakat	Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah Lingkungan	Rasio Kendaraan Angkutan Umum Terhadap Jumlah Penduduk	50%			
		Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Penduduk	7 unit			
		- Jumlah ijin trayek yg dikeluarkan/ jumlah penduduk - Jumlah uji kir - Jumlah angkutan darat/ jumlah penumpang angkutan darat x 100 %	0 12.568 20 %	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 901.800.000	Rp. 379.870.000

		Terciptanya pengetahuan bagi para sopir/ juru mudi terhadap turan dalam berlalu lintas di jalan	1 paket	Penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Rp. 50.000.000	Rp. 0
		Terciptanya halte angkutan umum yang aman, nyaman bagi pengguna jasa angkutan	7 halte	Penataan Tempat-Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	Rp. 177.300.000	Rp. 0
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek yang aman, nyaman dan ramah	10 unit	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Rp. 101.065.000	Rp. 0
		Terpilihnya awak angkutan umum teladan tingkat Kota Cirebon Terbinanya sopir/awak angkutan umum	3 orang 40 orang	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Rp. 65.440.000	Rp. 0
		Terciptanya pelayanan lalu lintas dan angkutan lebaran, natal dan tahun baru yang aman, tertib selamat dan lancar	2 bulan	Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Rp. 374.500.000	Rp. 374.500.000
		Memberikan pengetahuan tentang pentingnya keselamatan di jalan raya untuk pengguna jalan	33 orang	Penyuluhan Keselamatan Penguasaan Kendaraan Beromtor	Rp. 50.000.000	Rp. 5.370.000
		Tersedianya dokumen sistem pelayanan terminal penumpang tipe c yang aman, nyaman dan ramah	1 dokumen	Penyediaan Sistem Pelayanan Terminal Penumpang Tipe C	Rp. 83.495.000	Rp. 0
		Tersedianya sarana dan prasarana UPTD	100 %	Program Peningkatan Pelayanan UPTD	Rp. 561.788.000	Rp. 609.538.000
		Terselenggaranya operasional pelayanan UPT PJU	1 tahun	Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Umum	Rp. 139.188.000	Rp. 139.188.000
		Tersedianya barang cetakan, bahan baku bangunan, dan bbm	1 tahun	Peningkatan Pelayanan Pengujian	Rp. 422.600.000	Rp. 470.350.000

				Kendaraan Bermotor		
--	--	--	--	--------------------	--	--

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 %			
		Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 10.302.544.500	Rp. 9.881.627.500
		Tersedianya jasa kebersihan kantor	2 paket	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 300.000.000	Rp. 504.594.000
		Tersedianya surat kabar 5 jenis	5 jenis	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 22.500.000	Rp. 21.500.000
		Tersedianya notulen rapat, notulen rapat koordinasi, laporan kunjungan tamu, dan mamin pegawai	3 paket	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 216.200.000	Rp. 197.950.000
		Tersedianya laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	12 laporan	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 305.246.000	Rp. 92.775.220
		Tersedianya jasa pengamanan kantor	2 paket	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Rp. 307.992.000	Rp. 301.992.000
		Tersedianya materai @3000. @6000, dan perangko, tersedianya ATK, bahan cetakan, penggandaan fotokopi	1.250 buah 1 paket	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 116.466.500	Rp. 156.276.280
		Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor, listrik PJU se Kota Cirebon dan tersedianya logistic 12 bulan	48 rekening 2 jenis	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Rp. 9.014.140.000	Rp. 8.586.540.000
		Tersedianya perpanjangan STNK, polis asuransi, dan jasa KIR kendaraan roda 4, roda 2	56 kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
			7 kendaraan	Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah		
		Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	Rp. 2.237.600.000	Rp. 660.651.000
		Tersedianya pembangunan partisi kantor dan pos satpam Dinas	2 paket	Pembangunan Gedung Kantor	Rp. 0	Rp. 87.500.000
		Tersedianya kendaraan dinas jabatan roda 4 dan roda 2	2 unit 5 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasioanl / Jabatan	Rp. 1.667.000.000	Rp. 0
		Tersedianya PC Printer Rak besi Kursi kerja Lemari kartu induk (roll opcak) Tenda lipat Korden	3 unit 9 unit 2 unit 22 unit 0 unit 5 buah 1 paket	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Rp. 210.600.000	Rp. 219.197.810
		Tersedianya jasa servis, penggantian suku cadang, bbm untuk kendaraan dinas roda 4, roda 2, roda 3, dan kendaraan BRT	3 paket	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional / Jabatan	Rp. 400.000.000	Rp. 303.953.190
		Tersedianya jasa servis dan penggantian suku cadang peralatan / perlengkapan gedung kantor. Komponen listrik, instalasi genset, peralatan kebersihan, dan bahan pembersih	3 paket	Pemelihara Ruting / Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
		Prosentase tingkat kehadiran pegawai tinggi	100 %	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 195.351.500	Rp. 134.551.500
		Pakaian Dinas Harian	0 pcs	Pengadaan Pakaian Dinas /	Rp. 195.351.500	Rp. 134.551.500

		Pakaian Olahraga Pakaian Kerja Lapangan (APD) Pakaian Kerja Lapangan (Baju DALOPS)	140 pcs 2 set 30 stell	Lapangan Beserta Perlengkapannya		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan DISHUB	100 %	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 392.789.000	Rp. 362.166.000
		Tersedianya dokumen LKIP DISHUB 2020, laporan kinerja interim (triwulan	7 dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 162.160.000	Rp. 141.460.000
		Tersedianya dokumen DPA murni2020, RKA/DPA Perubahan 2020, dan RKA murni 2021	4 dokumen	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Rp.12.000.000	Rp. 7.695.000
		Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap 2 orang selama 1 tahun	2 orang	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Rp. 50.400.000	Rp. 52.650.000
		Tersedianya website DISHUB yang up to date dan publikasi media cetak	12 bulan	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Rp. 154.085.000	Rp. 154.085.000
		Tersedianya dokumen CALK 2020	1 dokumen	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
		Tersusunnya peraturan daerah penyelenggaraan perhubungan	100 %	Program Peraturan Perundang – Undangan	Rp. 40.951.000	Rp. 0
		Terinformasikannya peraturan daerah penyelenggara perhubungan	1 perda	Sosialisasi Kebijakan, Norma Standard an Prosedur Bidang Perhubungan	Rp. 40.951.000	Rp. 0

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Dinas Perhubungan selama tahun 2020 sebagai pelaksanaan amanah yang diemban organisasi. Isi dari akuntabilitas kinerja tersebut merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan penjabarannya, penjelasan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Dinas Perhubungan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Dalam proses pengukuran capaian kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan urusan Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2018-2023, perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Daerah Kota Cirebon tahun 2018-2023. Terdapat 1 (satu) rumusan Misi Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon yaitu : **Misi ke-3 "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan."**

Sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon yaitu:

- 1) Menurunnya titik rawan kemacetan lalu lintas;
- 2) Tersedianya angkutan umum massal yang ramah lingkungan;
- 3) Meningkatnya kinerja pelayanan publik.

Hal ini merupakan upaya pendukung Visi Misi Kota Cirebon khususnya pada Misi 3 Pemerintah Daerah Kota Cirebon "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana

Umum Berwawasan Lingkungan". Untuk menunjang misi ke-3 berikut ini merupakan hasil pengukuran indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 :

Tabel 3.1

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama DISHUB Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Jumlah Titik Rawan Kemacetan	4 titik	4 titik	100%
2	Tersedianya Angkutan Umum Masal Yang Ramah Lingkungan	Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	7 unit	10 unit	143%
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	88.24%	103,81%
Rata-rata					115,60%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan capaian kinerjanya **115,60%**.

3.1.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Di sub bagian ini akan dijelaskan mengenai pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja pada sasaran yang dimiliki Disdukcapil pada Tahun 2020. Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan / beberapa tahun yang lalu. Selain itu juga evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Sasaran 1 : "Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran menurunnya titik rawan kemacetan lalu lintas dengan 1 indikator mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan

predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator sasaran tersebut dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Capaian Sasaran 1 Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas

Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target	Realisasi 2020	Tercapai / Tidak	Target Akhir Renstra
Jumlah Titik Rawan Kemacetan Dari 6 Titik Menjadi 5 Titik	6 titik	5 titik	4 titik	4 titik	Tercapai	1 titik

Capaian sasaran menurunnya titik rawan kemacetan lalu lintas dengan satu indikator kinerja tahun 2020 terlihat bahwa realisasi capaiannya sudah mencapai target yang ditetapkan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kinerja segmen jalan adalah dengan derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan atau degree of saturation (DS) didefinisikan sebagai rasio arus lalu lintas (smp/jam) terhadap kapasitas (smp/jam) yang digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja segmen jalan. Nilai DS menunjukkan apakah segmen jalan tersebut memiliki masalah kapasitas atau tidak. Derajat kejenuhan dirumuskan sepersi persamaan sebagai berikut:

$$DS = \frac{Q}{C}$$

Sumber: MKJI, 1997

Keterangan :

DS = Derajat kejenuhan (smp/jam)

Q = Volume arus total (smp/jam)

C = Kapasitas ruas jalan (smp/jam)

Tabel 3.3

Tingkat Pelayanan Jalan atau Level of Service (LOS)

Tingkat Pelayanan Jalan	Karakteristik Lalu Lintas	Q/C
A	Kondisi arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalu lintas rendah	0,00-0,20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas.	0,20-0,44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan.	0,45-0,74
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dapat dikendalikan, V.C Ratio masih dapat ditolerir	0,75-0,84
E	Arus tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti, permintaan sudah mendekati kapasitas	0,85-1
F	Arus dipaksakan, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, antrian panjang (macet)	$\geq 1,00$

Tabel 3.4

Inventarisasi Ruas Jalan

No.	Nama Ruas Jalan	Volume (V)	Kapasitas (C)	V/C Ratio	LOS (Level of Service)
1	Siliwangi	1984,85	2695,68	0.74	C
2	Dr. Cipto Mangunkusumo	5321,9	2854,17	0,81	D
3	Pemuda	1998,2	2484	0,8	D
4	Pekiringan	2401	2648	0,91	E

Ada beberapa faktor yang mendukung Pencapaian target indikator kinerja pada Sasaran 1 yaitu:

- Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas dalam rangka mengurangi pergerakan arus lalu lintas ke wilayah Kanoman, Kasepuhan, dan Kacirebonan pada pelaksanaan Maulid nabi Muhammad SAW tahun 2020.



Gambar 3.1 Penjagaan pada Maulid nabi Muhammad SAW oleh Tim DALOPS

- Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum oleh tim PJU yang selalu siap untuk membuat cirebon selalu terang.



Gambar 3.2 Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum oleh Tim PJU

- Adanya Giat 68 yaitu pelaksanaan penjagaan pada simpang – simpang besar di Kota Cirebon dari jam 6 pagi sampai dengan jam 8 pagi.



Gambar 3.3 Giat 68 oleh anggota Dinas Perhubungan Kota Cirebon

- Pembatasan aktivitas dengan penutupan dan pengalihan arus di sejumlah ruas jalan di Kota Cirebon.



Gambar 3.4 Penutupan ruas jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon

- Pengendalian lalu lintas yang terpusat dan terpantau di ruang Area Traffic Control System.



Gambar 3.5 Pantauan Lalu Lintas dari ATCS Dishub Kota Cirebon

- Perbaiki rambu-rambu dan lampu isyarat lalu lintas guna untuk mendukung Cirebon menjadi kota yang tertib lalu lintas.



Gambar 3.6 Perbaikan Lampu Insyarat Lalu Lintas Oleh Tim yang bertugas

- Webinar dengan tema “Sosialisasi Keselamatan Pesepeda di Jalan” dengan narasumber Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang dilakukan di Cirebon Comand Center.



Gambar 3.7 Webinar dengan Kepala Dinas Perhubungan terkait Sosialisasi Keselamatan Pesepeda di Jalan

- Kegiatan operasi masker oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dan SKPD lainnya guna untuk membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon.



Gambar 3.8 Kegiatan operasi masker oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dan SKPD lainnya

- Kegiatan PAM Pengamanan dalam rangka Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di beberapa titik di Kota Cirebon bersama dengan instansi terkait.



Gambar 3.9 Kegiatan PAM Pengamanan dalam rangka Natal 2020 dan Tahun Baru 2021

- Kegiatan dialog interaktif dengan topik Teknologi ATCS meminimalisir kecelakaan lalu lintas bersama Kepala Dinas Perhubungan live di RRI Pro Kota Cirebon.



Gambar 3.10 Dialog interaktif dengan topik Teknologi ATCS meminimalisir kecelakaan lalu lintas bersama Kepala Dinas Perhubungan live di RRI Pro Kota Cirebon

- Kegiatan Apel gelar pasukan Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam rangka pengamanan Tahun Baru 2021 dengan instansi terkait.



Gambar IV.11 Kegiatan Apel gelar pasukan Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Sasaran 2 : “Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah Lingkungan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran tersedianya angkutan umum massal yang ramah lingkungan dengan 1 indikator mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 143% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator sasaran tersebut dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Capaian Sasaran 1 Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah Lingkungan

Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target	Tercapai / Tidak	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra
Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	0 unit	10 unit	7 unit	Tercapai	10 unit	10 unit

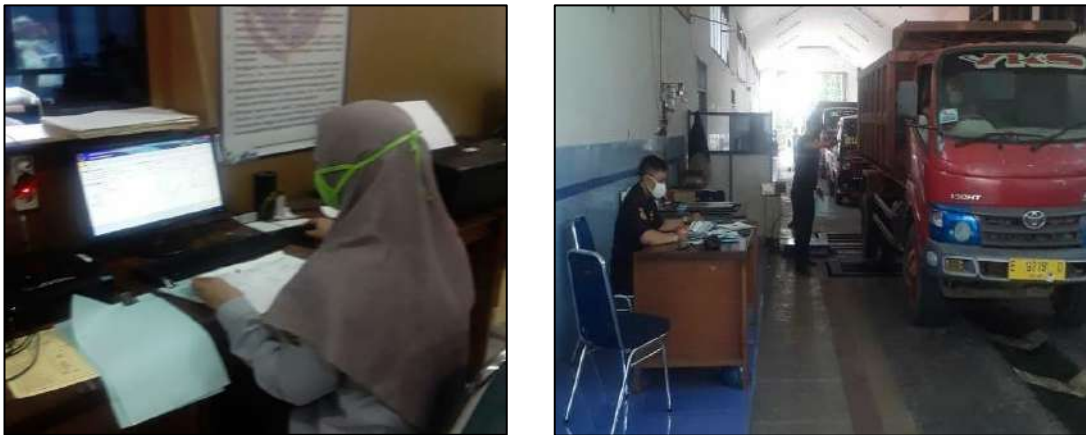
Capaian sasaran tersedianya angkutan umum massal Yang ramah lingkungan dengan satu indikator kinerja tahun 2020 terlihat bahwa realisasi capaiannya sudah mencapai target yang ditetapkan. Ada beberapa faktor yang mendukung Pencapaian targer indikator kinerja pada Sasaran 2 yaitu:

- Kunjungan wakil Wali Kota Cirebon ke UPTD PPP yang didampingi dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon beserta dengan jajarannya untuk membahas terkait fungsionalisasi Taman Edukasi Lalu Lintas, Operasional Bus BRT dan Program Bike Sharing.



Gambar 3.12 Kegiatan Kunjungan Wali Kota Cirebon bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon beserta jajarannya

- Adanya kegiatan pengujian kendaraan bermotor agar mengetahui kendaraan tersebut laik jalan atau tidak.



Gambar 3.13 Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Penguji PKB

Tabel 3.6 Data Kendaraan PKB Kota Cirebon Triwulan Tahun 2020

No	Jenis Kendaraan	Lulus Uji	Tidak Lulus
1	Taksi	-	-
2	Angkutan Kota	365	-
3	Otobus	5	-
4	Micro Bus	158	-
5	Mini Bus	78	-
TOTAL		606	0

- Tersedianya pemeliharaan sarana tempat – tempat pemberhentian angkutan umum (halte) yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa angkutan umum.
- Pemeliharaan terhadap fasilitas prasarana lalu lintas (halte) yang dilakukan oleh bidang lalu lintas agar selalu berfungsi sesuai dengan fungsinya.
- Adanya Angkutan masal berupa Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Cirebon.



Gambar 3.14 Bus Rapid Transit (BRT)

- Adanya angkutan umum berbasis aplikasi (online) yang diharapkan dapat mencakup pelayanan angkutan umum serta memberikan pelayanan yang aman, nyaman dan selamat kepada pengguna jasa angkutan umum.

Sasaran 3 : “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dengan 1 indikator mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator sasaran tersebut dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 9

Capaian Sasaran 1 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target	Tercapai / Tidak	Realisasi i 2020	Target Akhir Renstra
Indeks Kepuasan Masyarakat	94,84%	80%	Tercapai	88,24%	100%

Capaian sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dengan 1 indikator kinerja terlihat bahwa realisasi capaiannya sudah mencapai target yang ditetapkan. Indeks kepuasan

masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Kegiatan pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan melalui penyebaran kuisioner dengan menggunakan metode sampling kepada pelanggan yang akan melakukan pelayanan. Dari 3 UPT yaitu UPT PJU, UPT PKB, dan UPT Parkir yang dijadikan tempat untuk survai indeks kepuasan masyarakat. Dimana dalam realisasinya mendapatkan hasil sebesar 88,24%.

1. Analisis Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2020 adalah :

- Faktor Penghambat Keberhasilan :
 - Adanya refocusing anggaran di masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Tahun 2020. Hal ini menyebabkan pemenuhan atas sarana dan prasarana dan juga kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan menjadi terhenti.
- Faktor Penunjang Keberhasilan :
 - Telah dilaksanakan beberapa inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan .
 - Tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

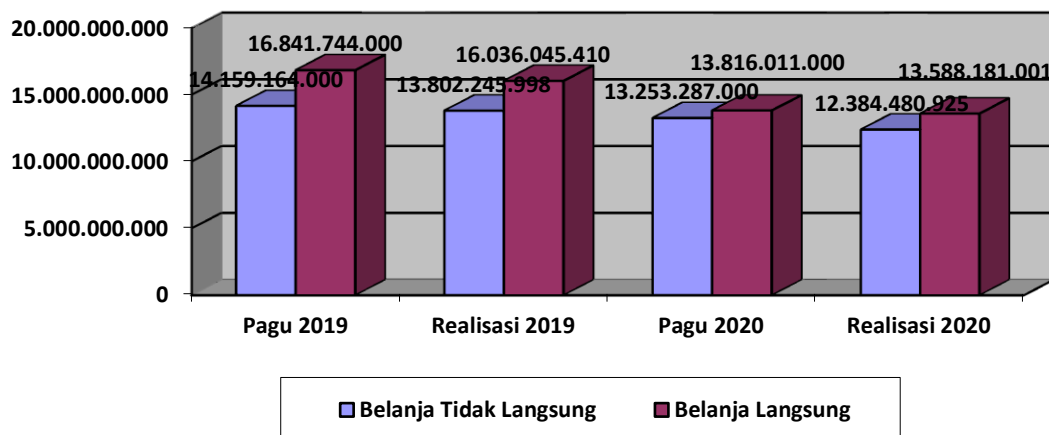
3.2.1 Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 27.069.298.000 dengan rincian:

- a.** Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai) sebesar Rp. 13.253.287.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.384.480.925,- atau 93,44%.
- b.** Belanja Langsung (Kegiatan) sebesar Rp. 13.816.011.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.588.181.001,- atau 98,36%.

Perbandingan Anggaran periode 2019 – 2020

(dalam ribuan rupiah)



Jika dibandingkan dengan tahun 2019 program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon pencapaian kinerja yang dilaksanakan lebih baik pencapaiannya dengan tahun 2020 ini. Walaupun terdapat refocusing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana.

Namun meskipun demikian secara keseluruhan pencapaian program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam hal pencapaian kinerja sangat baik.

				1.1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masukan: - Dana Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor	504,594,000,00	485,190,000,00		
							2 Jenis	2 Jenis		
				1.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Masukan: - Dana Output : Tersedianya surat kabar 5 jenis	21,500,000,00	21,500,000,00		

				1.3	Penyediaan Makanan dan Minuman	Masukan: - Dana Output : Tersedianya notulen rapat, notulen rapat koordinasi, laporan kunjungan tamu, dan mamin pegawai	197,950,000,00	169,806,300,00		
				1.4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Masukan: - Dana Output : Tersedianya lapora perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	92,775,220,00	51,961,720,00	Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 banyak kegiatan perjalanan dinas yang dibatalkan	Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dengan mengacu keterdiaan anggaran dan situasi pandemi COVID-19
				1.5	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Masukan: - Dana	301,992,000,00	301,686,000,00		

						Output : Tersedianya jasa pengamanan kantor	2 paket	2 paket		
				1.6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Masukan: - Dana Output : Tersedianya materai @3000, @6000, dan perangkot, tersedianya atk, bahan cetakan, penggandaan fotokopi	156,276,280,00	146,556,480,00		
				1.7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Masukan: - Dana Output : Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor, listrik PJU se Kota Cirebon dan	8,586,540,000,00	8,579,033,054,00		
							1250 buah 1 paket	1250 buah 1 paket		
							48 rekening 2 jenis	48 rekening 2 jenis		

						tersedianya logistik 12 bulan				
				1.8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Masukan: - Dana Output : Tersedianya perpanjangan STNK, polis asuransi, dan jasa KIR kendaraan roda 4, dan roda 2	20,000,000,00	16,802,300,00		
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masukan: - Dana Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	660,651,000,00	613,375,143,00		

				2.1	Pembangunan Gedung Kantor	Masukan: - Dana Output : Tersedianya pembangunan partisi kantor dan pos satpam dinas perhubungan	87,500,000,00	86,896,000,00		
				2.2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan	Masukan: - Dana Output : Tersedianya kendaraan dinas jabatan roda 4 dan roda 2	-	-	Terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada ketersediaan anggaran
				2.3	Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Masukan: - Dana	219,197,810,00	215,575,910,00		
							2 unti 5 unit	0 unit		

						Output : Tersedianya PC Printer Rak besi Kursi kerja Lemari kartu induk (roll opcak) Tenda lipat Korden 5 buah 1 paket	3 unit 9 unit 2 unit 22 unit 0 unit 5 buah 1 paket	3 unit 9 unit 2 unit 22 unit 0 unit 5 buah 1 paket		
				2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan	Masukan: - Dana Output : Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM untuk kendaraan dinas roda 4, roda 2, dan roda 3 dan kendaraan BRT	303,953,190,00 3 paket	277,447,233,00 3 paket		
				2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor	Masukan: - Dana	50,000,000,00	33,456,000,00	Dikarenakan barang yang ada tidak terjadi kerusakan, yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran untuk perbaikan	Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada kerusakan barang dan ketersediaan anggaran

						Output : Tersedianya jasa servis dan penggantian suku cadang peralatan/ perlengkapan gedung kantor, komponen listrik, instalasi genset, peralatan kebersihan, dan bahan pembersih	3 paket	3 paket		
				3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Masukan: - Dana Outcome : Persentase tingkat kehadiran pegawai tinggi	134,551,500,00	132,295,750,00		
				3.1	Pengadaan Pakaian Dinas/ Lapangan Beserta Perlengkapannya	Masukan: - Dana Output : Pakaian dinas harian Pakaian olahraga Pakaian kerja lapangan (APD) Pakaian Kerja Lapangan (Baju	134,551,500,00	132,295,750,00		
							0 pcs 140 stel 2 set	0 pcs 140 stel 2 set		

						DALOPS)	30 stel	30 stel		
				4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Masukan: - Dana Outcome : Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan DISHUB	362,166,000,00	359,431,000,00		
				4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan: - Dana Output : Tersedianya dokumen LAKIP DISHUB 2020, laporan kinerja Interim (triwulan) DISHUB 2020, dan laporan tahunan DISHUB 2020	141,460,000,00	139,760,000,00		
							7 dokumen	7 dokumen		

				4.2	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Masukan: - Dana Output : Tersedianya dokumen DPA murni tahun 2020, RKA/DPA perhuban 2020, dan RKA murni 2021	7,695,000,00	7,695,000,00		
				4.3	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Masukan: - Dana Output : Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap 2 orang selama 1 tahun	52,650,000,00	51,650,000,00		
				4.4	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Masukan: - Dana	154,085,000,00	154,050,000,00		

						Output : Tersedianya website DISHUB yang up to date dan Publikasi media cetak	12 bulan	12 bulan		
				4.5	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Masukan: - Dana Output : Tersedianya dokumen CALK 2020	5,000,000,00	5,000,000,00		
				4.6	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Masukan: - Dana Output : Tersedianya dokumen RENJA 2021 dan perubahannya; tersedianya laporan hasil forum perangkat daerah tahun perencanaan 2021	1,276,000,00	1,276,000,00		

				5	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>15,410,000,00</p> <p>15,410,000,00</p> <p>Outcome :</p> <p>Tersedianya pedoman/arahan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan (Kep.Kadis) Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan</p> <p>100%</p> <p>-</p>			
				5.1	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>15,410,000,00</p> <p>15,410,000,00</p> <p>Output :</p> <p>Dokumen laporan forum LLAJ sebagai tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, inventori bidang sarana dan prasarana</p> <p>2 buku</p> <p>2 buku</p>			

						lalu lintas dan angkutan jalan				
			Menerapkan standar pengujian kendaraan bermotor	6	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	<p>Masukan:</p> <p>- Dana</p> <p>Outcome :</p> <p>Tercapainya standarisasi alat uji kendaraan bermotor</p>	25,000,000,00	24,730,000,00		
				6.1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	<p>Masukan:</p> <p>- Dana</p> <p>Output :</p> <p>Berfungsinya kestabilan dan akurasi alat uji kendaraan bermotor sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi teknis dan laik jalan kendaraan bermotor</p>	25,000,000,00	24,730,000,00		

			Tinggi dan tepat guna, membangun sistem angkutan massal, meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui peremajaan armada bus sedang, penambahan dan penataan trayek, penataan tempat pemberhentian angkutan umum serta pelayanan hari-hari besar	7	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Masukan: - Dana Outcome: Jumlah ijin trayek yg dikeluarkan / jumlah penduduk Jumlah uji kir Jumlah angkutan darat/ jumlah penumpang angk.darat x 100 %	379,870,000,00	370,876,400,00		
				7.1	Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Masukan: - Dana	-	-	Terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada ketersediaan anggaran

						<p>Output :</p> <p>pengetahuan bagi para sopir/ juru mudi terhadap aturan dalam berlalu lintas di jalan</p>					
				7.2	Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	<p>Masukan:</p> <p>- Dana</p> <p>Output :</p> <p>Terciptanya halte angkutan umum yg aman, nyaman bagi pengguna jasa angkutan</p>	-	-	7 halte	-	<p>Terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19</p> <p>Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada ketersediaan anggaran</p>
				7.3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	<p>Masukan:</p> <p>- Dana</p> <p>Output :</p> <p>Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek</p>	-	-	10 unit	-	<p>Terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19</p> <p>Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada ketersediaan anggaran</p>

						yg aman, nyaman dan ramah							
				7.4	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Masukan: - Dana Output : Terpilihnya awak angkutan umum teladan tingkat Kota Cirebon Terbinanya sopir / awak angkutan umum	-	-	3 orang	-	Terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada ketersediaan anggaran	
				7.5	Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Masukan: - Dana Output : Terciptanya pelayanan lalu lintas dan angkutan lebaran,	374,500,000,00	365,506,400,00					

						natal dan tahun baru yang aman, tertib selamat dan lancar	2 bulan	2 bulan		
				7.6	Penyuluhan keselamatan pengguna kendaraan bermotor	Masukan: - Dana Output : Memberikan pengetahuan tentang pentingnya keselamatan di jalan raya untuk pengguna jalan	5,370,000,00	5,370,000,00	Terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada ketersediaan anggaran
				7.8	Penyediaan Sistem Pelayanan Terminal Penumpang Tipe C	Masukan: - Dana Output : Tersedianya dokumen sistem pelayanan terminal penumpang tipe c yg aman, nyaman dan ramah	-	-	Terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada ketersediaan anggaran

			Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian dan pengamanan lalu	8	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Masukan: - Dana 1,447,197,000,00 1,407,089,000,00 Outcome : Jumlah rambu yg disediakan / jumlah rambu yg dibutuhkan (standar) x 100 % 85 % 73.47%				
				8.1	Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas	Masukan: - Dana - - Output : Tersedianya pengadaan rambu-rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas 52 buah - Papan informasi tarif parkir			Terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada ketersediaan anggaran

							18 buah	-		
				8.2	Perbaikan Lampu Isyarat Pengatur Lalu Lintas (Traffic Light)	Masukan: - Dana Output : Berfungsinya traffic light untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	135,800,000,00	128,560,000,00		
				8.3	Penataan dan Pembangunan PJU	Masukan: - Dana Output : Terwujudnya pemasangan PJU di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan			Terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada ketersediaan anggaran

				8.4	Pemeliharaan PJU	Masukan: - Dana Output : Terwujudnya PJU yg berfungsi secara keseluruhan	981,807,000,00 6589 titik	976,933,000,00 8185 titik		
				8.5	Pemeliharaan Marka dan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Masukan: - Dana Output : Berfungsinya rambu lalu lintas dan marka jalan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	- 550 m2	- -	Terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada ketersediaan anggaran
				8.6	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Masukan: - Dana	140,500,000,00	113,426,000,00		

						Output : Menekan tingkat kecelakaan dan meningkatkan pengguna jalan (operasi penertiban gabungan dengan polisi)	1 tahun	1 tahun		
			8.7	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Masukan: - Dana Output : Dokumen lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan (WTN)	-	-	Terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada ketersediaan anggaran	
			8.8	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Masukan: - Dana Output : Pemilihan pelajar pelopor keselamatan untuk tingkat SMA/SMK se wilayah Kota Cirebon	-	-	Terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada ketersediaan anggaran	

							3 orang	-		
				8.9	Penyediaan Jasa pelayanan Automatic Traffic Control System dan Analisis Manajemen Dampak Lalu Lintas	Masukan: - Dana Output : Terfasilitasinya pelayanan ATCS dan amdalalin DISHUB Kota Cirebon	189,090,000,00 2 orang 1 dokumen	188,170,000,00 2 orang 1 dokumen		
				8.10	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas (DAK)	Masukan: - Dana Output : Rambu pendahulu petunjuk jalan Uk.120 x 240 cm	- 26 buah	- -	Terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada ketersediaan anggaran

				8.11	Pengadaan Rambu Lalu Lintas (BANGUB)	Masukan: - Dana Output : Rambu lalu lintas jenis F Rambu pendahulu petunjuk jalan	-	-	75 buah 20 buah	-	Terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada ketersediaan anggaran
				8.12	Penataan dan Pembangunan PJU (BANGUB)	Masukan: - Dana Output : Pemasangan jaringan PJU di wilayah Kota Cirebon Belanja lampu LED Smart PJU	-	-	1 Paket 111 buah	-	Terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada ketersediaan anggaran

				8.13	Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan Jl Terusan Pemuda (Kompleks Perkantoran) By Pass Kec. Kesambi Kota Cirebon (Bantuan Gubernur)	Masukan: - Dana Output : Pemasangan jaringan PJU di wilayah Kota Cirebon Belanja lampu LED Smart PJU	-	-	1 Paket 111 buah	-	Terjadi refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang mengacu pada ketersediaan anggaran
			Tinggi dan tepat gu Membangun sistem angkutan massal, meningkatkan kuantitas dan peremajaan armada bus sedang, penambahan dan penataan trayek, penataan tempat pemberhentian angkutan umum serta pelayanan hari-hari besar	9	Program Peningkatan Pelayanan UPTD	Masukan: - Dana Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana UPTD	609,538,000,00	598,611,879,00	100%	100%		

				9.1	Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Umum	Masukan: - Dana Output : Terselenggaranya operasional pelayanan UPT PJU	139,188,000,00	135,210,879,00		
				9.2	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Masukan: - Dana Output : Tersedianya barang cetakan, bahan baku bangunan dan BBM	470,350,000,00	463,401,000,00		
			Penerapan / perubahan geometris sistem parkir, penerapan sistem perparkiran	10	Program Peningkatan Pelayanan Parkir	Masukan: - Dana Outcome :	300,000,000,00	294,425,975,00	- Adanya pandemi COVID-19 - Tarif parkir belum sesuai dengan kondisi lapangan - Usulan perubahan perda penyelenggaraan	- Melakukan perubahan / peninjauan kembali perda agar tarif parkir sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini

						Meningkatnya pendapatan dan retribusi parkir	77.1%	46%	perparkiran belum terealisasi	
				10.1	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Perparkiran	Masukan: - Dana Output : Terselenggaranya pelayanan unit pelayanan teknis perparkiran yg optimal	300,000,000,00	294,425,975,00		
			Tinggi dan tepat guna, membangun sistem angkutan massal, meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui peremajaan armada bus sedang, penambahan dan penataan trayek, penataan tempat	11	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Masukan: - Dana Outcome : Tersusunnya peraturan daerah penyelenggaraan perhubungan	-	-		
							100%	-		

			<p>pemberhentian angkutan umum serta pelayanan hari-hari besar</p>	11.1	<p>Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan</p>	<p>Masukan:</p> <p>- Dana</p> <p>Output :</p> <p>Terinformasinya peraturan daerah penyelenggaraan perhubungan</p>	-	-	-	1 perda
--	--	--	---	------	---	---	---	---	---	---------

BAB IV

PENUTUP

Pagu Anggaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2020 mengalami penurunan yaitu dari Tahun 2019 sebesar Rp. 16.841.744.000,- (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) menjadi Rp. 13.816.011.000,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sebelas Ribu Rupiah) pada tahun 2020.

Dengan menurunnya PAGU Belanja Langsung, Dinas Perhubungan Kota Cirebon mampu melaksanakan dan merealisasikan kegiatan yang ada. Dalam pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2020 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran yang ditetapkan telah dapat dicapai dengan sangat baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Dinas Perhubungan secara umum dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan sangat baik dan berhasil pada tahun 2020. Hasil yang telah dicapai di Tahun ini tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas manajemen organisasi (Performance Management System) di lingkungan dinas. Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indicator adalah hasil yang sangat baik, walaupun untuk pencapaian target banyak factor yang mempengaruhi, baik dari internal maupun eksternal dan dengan berupaya untuk memaksimalkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2020, semoga bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja DISHUB Kota Cirebon dan sebagai data pendukung pertanggung jawaban Walikota Cirebon.



PEMERINTAH KOTA CIREBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	5.404.000.000,00	0,00	2.850.169.165,00	2.850.169.165,00	(2.553.830.835,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.404.000.000,00	0,00	2.850.169.165,00	2.850.169.165,00	(2.553.830.835,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.404.000.000,00	0,00	2.850.169.165,00	2.850.169.165,00	(2.553.830.835,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	5.255.000.000,00	0,00	2.840.339.165,00	2.840.339.165,00	(2.414.660.835,00)
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	3.500.000.000,00	0,00	1.623.206.500,00	1.623.206.500,00	(1.876.793.500,00)
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.755.000.000,00	0,00	1.217.132.665,00	1.217.132.665,00	(537.867.335,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	24.000.000,00	0,00	9.830.000,00	9.830.000,00	(14.170.000,00)
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	24.000.000,00	0,00	9.830.000,00	9.830.000,00	(14.170.000,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(125.000.000,00)
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(125.000.000,00)
5	BELANJA	27.069.298.000,00	0,00	25.973.261.926,00	25.973.261.926,00	(1.096.036.074,00)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.253.287.000,00	0,00	12.384.480.925,00	12.384.480.925,00	(868.806.075,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	13.253.287.000,00	0,00	12.384.480.925,00	12.384.480.925,00	(868.806.075,00)
5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	6.775.716.000,00	0,00	6.726.783.922,00	6.726.783.922,00	(48.932.078,00)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.331.132.000,00	0,00	5.294.200.260,00	5.294.200.260,00	(36.931.740,00)
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	604.049.000,00	0,00	599.064.324,00	599.064.324,00	(4.984.676,00)
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	210.761.000,00	0,00	210.565.000,00	210.565.000,00	(196.000,00)
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	27.240.000,00	0,00	27.240.000,00	27.240.000,00	0,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	229.963.000,00	0,00	227.235.000,00	227.235.000,00	(2.728.000,00)
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	319.077.000,00	0,00	314.954.580,00	314.954.580,00	(4.122.420,00)
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.448.000,00	0,00	9.875.941,00	9.875.941,00	427.941,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	75.000,00	0,00	74.600,00	74.600,00	(400,00)
5.1.1.01.24	Jaminan Kecelakaan Kerja	10.993.000,00	0,00	10.893.590,00	10.893.590,00	(99.410,00)
5.1.1.01.25	Jaminan Kematian	32.978.000,00	0,00	32.680.627,00	32.680.627,00	(297.373,00)
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	6.477.571.000,00	0,00	5.657.697.003,00	5.657.697.003,00	(819.873.997,00)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6.207.371.000,00	0,00	5.657.697.003,00	5.657.697.003,00	(549.673.997,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	270.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(270.200.000,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	13.816.011.000,00	0,00	13.588.781.001,00	13.588.781.001,00	(227.229.999,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	462.622.000,00	0,00	447.597.000,00	447.597.000,00	(15.025.000,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS	75.172.000,00	0,00	66.847.000,00	66.847.000,00	(8.325.000,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	0,00	26.112.000,00	26.112.000,00	(288.000,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	48.772.000,00	0,00	40.735.000,00	40.735.000,00	(8.037.000,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	387.450.000,00	0,00	380.750.000,00	380.750.000,00	(6.700.000,00)
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	52.650.000,00	0,00	51.650.000,00	51.650.000,00	(1.000.000,00)
5.2.1.02.05	Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS	334.800.000,00	0,00	329.100.000,00	329.100.000,00	(5.700.000,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.056.301.190,00	0,00	12.848.322.091,00	12.848.322.091,00	(207.979.099,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.282.451.600,00	0,00	1.255.902.200,00	1.255.902.200,00	(26.549.400,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.552.600,00	0,00	56.584.200,00	56.584.200,00	(968.400,00)
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	976.782.000,00	0,00	973.778.000,00	973.778.000,00	(3.004.000,00)
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.835.000,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	(475.000,00)
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	234.882.000,00	0,00	215.478.000,00	215.478.000,00	(19.404.000,00)
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	7.000.000,00	0,00	4.744.000,00	4.744.000,00	(2.256.000,00)
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	0,00	1.958.000,00	1.958.000,00	(442.000,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	39.940.000,00	0,00	39.940.000,00	39.940.000,00	0,00
5.2.2.02.13	Belanja Pakaian/Kaos dan Kelengkapannya Peserta Pelatihan/Upacara/Pameran	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00
5.2.2.02.15	Belanja Peralatan Rumah Tangga	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00
5.2.2.02.16	Belanja Kelengkapan Komputer	32.725.000,00	0,00	32.725.000,00	32.725.000,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.306.585.000,00	0,00	9.301.741.054,00	9.301.741.054,00	(4.843.946,00)
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	0,00	632.523,00	632.523,00	(1.767.477,00)
5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	0,00	9.257.025,00	9.257.025,00	(2.742.975,00)
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.540.000.000,00	0,00	8.539.936.206,00	8.539.936.206,00	(63.794,00)
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	0,00	17.765.300,00	17.765.300,00	(234.700,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor	264.600.000,00	0,00	264.600.000,00	264.600.000,00	0,00
5.2.2.03.28	Belanja Jasa Pengamanan Kantor	294.000.000,00	0,00	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00
5.2.2.03.32	Belanja Jasa Publikasi	154.085.000,00	0,00	154.050.000,00	154.050.000,00	(35.000,00)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	635.941.190,00	0,00	588.982.687,00	588.982.687,00	(46.958.503,00)
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	60.550.640,00	0,00	31.977.000,00	31.977.000,00	(28.573.640,00)
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	93.847.308,00	0,00	86.717.272,00	86.717.272,00	(7.130.036,00)
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	461.543.242,00	0,00	453.486.115,00	453.486.115,00	(8.057.127,00)

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.000.000,00	0,00	16.802.300,00	16.802.300,00	(1.197.700,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	594.943.180,00	0,00	582.953.730,00	582.953.730,00	(11.989.450,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.777.700,00	0,00	549.139.400,00	549.139.400,00	(11.638.300,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.739.980,00	0,00	25.439.580,00	25.439.580,00	(300.400,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	8.010.500,00	0,00	7.959.750,00	7.959.750,00	(50.750,00)
5.2.2.06.04	Belanja Dokumentasi	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan/Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.000.000,00)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.000.000,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	121.300.000,00	0,00	120.868.000,00	120.868.000,00	(432.000,00)
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00
5.2.2.10.14	Belanja Sewa Bandwidth	96.000.000,00	0,00	95.568.000,00	95.568.000,00	(432.000,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	432.925.000,00	0,00	372.953.700,00	372.953.700,00	(59.971.300,00)
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	393.647.000,00	0,00	337.360.700,00	337.360.700,00	(56.286.300,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.978.000,00	0,00	32.293.000,00	32.293.000,00	(3.685.000,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	24.300.000,00	0,00	22.600.000,00	22.600.000,00	(1.700.000,00)
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24.300.000,00	0,00	22.600.000,00	22.600.000,00	(1.700.000,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	104.600.000,00	0,00	104.600.000,00	104.600.000,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	104.600.000,00	0,00	104.600.000,00	104.600.000,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92.775.220,00	0,00	51.961.720,00	51.961.720,00	(40.813.500,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.775.220,00	0,00	51.961.720,00	51.961.720,00	(40.813.500,00)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	152.100.000,00	0,00	144.379.000,00	144.379.000,00	(7.721.000,00)
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan/Rambu Lalu Lintas/Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	123.750.000,00	0,00	123.750.000,00	123.750.000,00	0,00
5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	28.350.000,00	0,00	20.629.000,00	20.629.000,00	(7.721.000,00)
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 22 . 03	Belanja Plakat/Piala/Medali/Souvenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Profesi	261.440.000,00	0,00	261.440.000,00	261.440.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Profesi	261.440.000,00	0,00	261.440.000,00	261.440.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Pengganti Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Uang Pengganti Transport Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 99	Belanja Barang Non Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 99 . 01	Belanja Barang Non Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal	297.087.810,00	0,00	292.861.910,00	292.861.910,00	(4.225.900,00)
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	70.496.800,00	0,00	68.174.900,00	68.174.900,00	(2.321.900,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	28.496.800,00	0,00	28.496.800,00	28.496.800,00	0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	15.000.000,00	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	(800.000,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.000.000,00	0,00	25.478.100,00	25.478.100,00	(1.521.900,00)
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	99.591.010,00	0,00	99.591.010,00	99.591.010,00	0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.418.440,00	0,00	27.418.440,00	27.418.440,00	0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	72.172.570,00	0,00	72.172.570,00	72.172.570,00	0,00
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	26.500.000,00	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	(1.300.000,00)
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	26.500.000,00	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	(1.300.000,00)
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	87.500.000,00	0,00	86.896.000,00	86.896.000,00	(604.000,00)
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	87.500.000,00	0,00	86.896.000,00	86.896.000,00	(604.000,00)
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(21.665.298.000,00)	0,00	(23.123.092.761,00)	(23.123.092.761,00)	(1.457.794.761,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIA YAAN TA HUN BERKENAAN	(21.665.298.000,00)	0,00	(23.123.092.761,00)	(23.123.092.761,00)	(1.457.794.761,00)



DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ANDI ARMAWAN
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH
Jabatan : WALI KOTA CIREBON
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH

Cirebon, Oktober 2020

Pihak Pertama,

Drs. ANDI ARMAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Jumlah Titik Rawan Kemacetan Dari 5 Titik Menjadi 4 Titik	4 titik
2	Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah Lingkungan	Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	7 unit
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 1.477.197.000,-	-
2	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 15.410.000,-	-
3	Peningkatan Pelayanan UPTD	Rp. 609.538.000,-	-
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 25.000.000,-	-
5	Peningkatan Pelayanan Parkir	Rp. 300.000.000,-	-
6	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 379.870.000,-	-
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 9.881.627.500,-	-
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 660.651.000,-	-
9	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 134.551.500,-	-
10	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 362.166.000,-	-
	JUMLAH	Rp. 13.816.011.000	

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH

Drs. ANDI ARMAWAN



DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ANDI ARMAWAN
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH
Jabatan : WALI KOTA CIREBON
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH

Cirebon, Oktober 2020

Pihak Pertama,

Drs. ANDI ARMAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Jumlah Titik Rawan Kemacetan Dari 5 Titik Menjadi 4 Titik	4 titik
2	Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah Lingkungan	Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	7 unit
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 1.477.197.000,-	-
2	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 15.410.000,-	-
3	Peningkatan Pelayanan UPTD	Rp. 609.538.000,-	-
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 25.000.000,-	-
5	Peningkatan Pelayanan Parkir	Rp. 300.000.000,-	-
6	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 379.870.000,-	-
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 9.881.627.500,-	-
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 660.651.000,-	-
9	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 134.551.500,-	-
10	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 362.166.000,-	-
JUMLAH		Rp. 13.816.011.000	

Pihak Kedua,

Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH

Pihak Pertama,

Drs. ANDI ARMAWAN



DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ANDI ARMAWAN
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH
Jabatan : WALI KOTA CIREBON
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH

Cirebon, Oktober 2020

Pihak Pertama,

Drs. ANDI ARMAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Jumlah Titik Rawan Kemacetan Dari 5 Titik Menjadi 4 Titik	4 titik
2	Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah Lingkungan	Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	7 unit
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 1.477.197.000,-	-
2	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 15.410.000,-	-
3	Peningkatan Pelayanan UPTD	Rp. 609.538.000,-	-
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 25.000.000,-	-
5	Peningkatan Pelayanan Parkir	Rp. 300.000.000,-	-
6	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 379.870.000,-	-
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 9.881.627.500,-	-
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 660.651.000,-	-
9	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 134.551.500,-	-
10	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 362.166.000,-	-
JUMLAH		Rp. 13.816.011.000	

Pihak Kedua,

Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH

Pihak Pertama,

Drs. ANDI ARMAWAN



PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWANDI, ST
Jabatan : KEPALA BIDANG KESELAMATAN DAN TEHNIK SARANA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. ANDI ARMAWAN
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Cirebon, Oktober 2020

Pihak Pertama,


Drs. ANDI ARMAWAN
NIP. 19691214 199003 1 005


SUWANDI. ST
NIP. 19710921 199901 1 001

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2020
 BIDANG KESELAMATAN DAN TEHNIK SARANA
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Ijin Trayek yg dikeluarkan / jumlah penduduk	0,0031
		Jumlah Uji Kir	12.568
		Jumlah Angkutan Darat/ Jumlah penumpang angk. Darat x 100 %	20%
2	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Rambu yg disediakan / jumlah rambu yg dibutuhkan (standar) x 100 %	85%
		Jumlah ApiLL disediakan / jumlah APILL yg dibutuhkan (standar) x 100 %	85%
		Jumlah PJU yg disediakan / jumlah PJU yg dibutuhkan (standar) x 100 %	85%


No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Rp. 374.500.000,00	APBD
2	Penyuluhan keselamatan pengguna kendaraan bermotor	Rp. 5.370.000,00	APBD
3	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Rp. 140.500.000,00	APBD

Cirebon, Oktober 2020

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Cirebon

Kepala Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana
Dinas Perhubungan Kota Cirebon


Drs. ANDI ARMAWAN
 NIP. 19691214 199003 1 005


SUWANDI. ST
 NIP. 19710921 199901 1 001



PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. GUNAWAN, ATD, DEA
Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIREBON

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. ANDI ARMAWAN
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cirebon, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. ANDI ARMAWAN
NIP. 19691214 199003 1 005

H. GUNAWAN, ATD, DEA
NIP. 19680522 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2020
BIDANG LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya pedoman/arahan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan (Kep. Kadis)	100%
		Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%
2	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Rambu yg disediakan / jumlah rambu yg dibutuhkan (standar) x 100 %	85%
		Jumlah ApiLL disediakan / jumlah APILL yg dibutuhkan (standar) x 100 %	85%
		Jumlah PJU yg disediakan / jumlah PJU yg dibutuhkan (standar) x 100 %	85%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 15.410.000,00	APBD
2	Perbaikan Lampu Isyarat Pengatur Lalu Lintas (Traffic Light)	Rp. 135.800.000,00	APBD
3	Penyediaan Jasa pelayanan Automatic Trafic Control System dan Analisis Manajemen Dampak Lalu Lintas	Rp. 189.090.000,00	APBD

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Cirebon



Drs. ANDI ARMAWAN
NIP. 19691214 199003 1 005

Cirebon, Oktober 2020

Kepala Bidang Lalu Lintas
Dinas Perhubungan Kota Cirebon



H. GUNAWAN, ATD, DEA
NIP. 19680522 199203 1 002



PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UJIANTO WAHYU UTOMO, ATD
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. ANDI ARMAWAN
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. ANDI ARMAWAN
NIP. 19691214 199003 1 005

Cirebon, Oktober 2020

Pihak Pertama,

UJIANTO WAHYU UTOMO, ATD
NIP. 19691114 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2020
SEKRETARIAT
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

No	Nama Program	Indikator Program	Target
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)	100 %
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)	100 %
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	100 %
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja keuangan SKPD	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 504.594.000,00	APBD
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 21.500.000,00	APBD
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 197.950.000,00	APBD
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 92.775.220,00	APBD
5	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Rp. 301.992.000,00	APBD
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 156.276.280,00	APBD
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Rp. 8.586.540.000,00	APBD
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Rp. 20.000.000,00	APBD
9	Pembangunan Gedung Kantor	Rp. 87.500.000,00	
10	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Rp. 219.197.810,00	APBD
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Rp. 303.953.190,00	APBD
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Rp. 50.000.000,00	APBD
13	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Rp. 134.551.500,00	APBD
14	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 141.460.000,00	APBD
15	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Rp. 7.695.000,00	APBD
16	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Rp. 52.650.000,00	APBD
17	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Rp. 154.085.000,00	APBD
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Rp. 5.000.000,00	APBD
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Rp. 1.276.000,00	APBD

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Cirebon



Drs. ANDI ARMAWAN
NIP. 19691214 199003 1 005

Cirebon, Oktober 2020
Sekretaris Dinas Perhubungan
Kota Cirebon



UJIANTO WAHYU UTOMO, ATD
NIP. 19691114 199203 1 004



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. NAFILAH, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : UJIANTO WAHYU UTOMO, ATD
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

UJIANTO WAHYU UTOMO, ATD
NIP. 19691114 199203 1 004

Cirebon, Oktober 2020

Pihak Pertama,

Hj. NAFILAH, SE
NIP. 19720519 200604 2 010



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAENAL ARIFIN
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : UJIANTO WAHYU UTOMO, ATD
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

UJIANTO WAHYU UTOMO, ATD
NIP. 19691114 199203 1 004

Cirebon, Oktober 2020

Pihak Pertama,

ZAENAL ARIFIN
NIP. 19640705 198303 1 004

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan	2 paket
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar	5 jenis
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya notulen rapat, notulen rapat koordinasi, laporan kunjungan tamu, dan mamin pegawai	3 paket
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	12 laporan
5	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	2 paket
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Materai @3000, @6000, dan perangko Tersedianya ATK, bahan cetakan, penggandaan, fotokopi	1.250 buah 1 paket
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor, listrik PJU se Kota Cirebon Tersedianya logistik 12 bulan	48 rekening 2 jenis
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya perpanjangan STNK, polis asuransi, dan jasa KIR kendaraan roda 4, roda 2	56 kendaraan 7 kendaraan
9	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya pembangunan partisi kantor dan pos satpam Dinas Perhubungan	2 paket
10	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya PC Printer Rak Besi Kursi Kerja Lemari Kartu Induk (Roll Opcak)	3 unit 9 unit 2 unit 22 unit 0 unit

		Tenda Lipat Korden	5 buah 1 paket
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tersedianya jasa servis, penggantian suku cadang, BBM untuk kendaraan dinas roda 4, roda 2, dan roda 3 dan kendaraan BRT	3 paket
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya jasa servis dan penggantian suku cadang peralatan/perlengkapan gedung kantor, komponen listrik, instalasi genset, peralatan kebersihan, dan bahan pembersih	3 paket
13	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas harian Pakaian olahraga Pakaian kerja lapangan (APD) Pakaian kerja lapangan (Baju DALOPS)	0 pcs 140 stell 2 set 30 stell
14	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap 2 orang selama 1 tahun	2 orang
15	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Tersedianya website dishub yang up to date dan publikasi media cetak	12 bulan

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 504.594.000,00	APBD
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 21.500.000,00	APBD
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 197.950.000,00	APBD
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 92.775.220,00	APBD
5	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Rp. 301.992.000,00	APBD
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 156.276.280,00	APBD
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Rp. 8.586.540.000,00	APBD

Air, Listrik dan Logistik

8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Rp.	20.000.000,00	APBD
9	Pembangunan Gedung Kantor	Rp.	87.500.000,00	APBD
10	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Rp.	219.197.810,00	APBD
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Rp.	303.953.190,00	APBD
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Rp.	50.000.000,00	APBD
13	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Rp.	134.551.500,00	APBD
14	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Rp.	52.650.000,00	APBD
15	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Rp.	154.085.000,00	APBD

Cirebon, Oktober 2020

Sekretaris Dinas Perhubungan
Kota Cirebon

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Perhubungan Kota Cirebon



UJIANTO WAHYU UTOMO, ATD
NIP. 19691114 199203 1 004



ZAENAL ARIFIN
NIP. 19640705 198303 1 004



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIKRI HOPIANA, S.Sos.,M.Si
Jabatan : KEPALA SEKSI PENYULUHAN KESELAMATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SUWANDI, ST
Jabatan : KEPALA BIDANG KESELAMATAN DAN TEHNIK SARANA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cirebon, Oktober 2020

Pihak Pertama,

DIKRI HOPIANA, S.Sos.,M.Si
NIP. 19680922 199203 1 003

Pihak Kedua,

SUWANDI, ST
NIP. 19710921 199901 1 001

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

SEKSI PENYULUHAN KESELAMATAN

DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Penyuluhan keselamatan pengguna kendaraan bermotor	Memberikan pengetahuan tentang pentingnya keselamatan di jalan raya untuk pengguna jalan	33 orang

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyuluhan keselamatan pengguna kendaraan bermotor	Rp. 5.370.000,00	APBD

Kepala Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana
Dinas Perhubungan Kota Cirebon


SUWANDI, ST
NIP. 19710921 199901 1 001

Cirebon, Oktober 2020
Kepala Seksi Penyuluhan Keselamatan
Dinas Perhubungan Kota Cirebon


DIKRI HOPIANA, S.Sos., M.Si
NIP. 19680922 199203 1 003



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RONY PRIATNA, S.SiT
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SUWANDI, ST
Jabatan : KEPALA BIDANG KESELAMATAN DAN TEHNIK SARANA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


SUWANDI, ST
NIP. 19710921 199901 1 001

Cirebon, Oktober 2020
Pihak Pertama,


RONY PRIATNA, S.SiT
NIP. 19750709 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
SEKSI PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Terciptanya pelayanan lalu lintas dan angkutan lebaran, natal dan tahun baru yang aman, tertib, selamat dan lancar	2 bulan
2	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Menekan tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan (operasi penertiban gabungan dengan polisi)	1 tahun

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Rp. 374.500.000,00	APBD
2	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Rp. 140.500.000,00	APBD

Kepala Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana
Dinas Perhubungan Kota Cirebon


SUWANDI, ST
NIP. 19710921 199901 1 001

Cirebon, Oktober 2020
Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional
Dinas Perhubungan Kota Cirebon


RONY PRIATNA, S.Si
NIP. 19750709 199803 1 003



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIJO HERMAWAN, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. GUNAWAN, ATD, DEA
Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIREBON

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. GUNAWAN, ATD, DEA
NIP. 19680522 199203 1 002

Cirebon, Oktober 2020
Pihak Pertama,

SETIJO HERMAWAN, SE
NIP. 19711224 199503 1 005

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

**SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dokumen laporan FORUM LLAJ sebagai tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, inventori bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	2 buku
2	Penyediaan Jasa pelayanan Automatic Traffic Control System dan Analisis Manajemen Dampak Lalu Lintas	Terfasilitasinya pelayanan ATCS dan andalalin dinas perhubungan Kota Cirebon	2 orang 1 dokumen

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 15.410.000,00	APBD
2	Penyediaan Jasa pelayanan Automatic Traffic Control System dan Analisis Manajemen Dampak Lalu Lintas	Rp. 189.090.000,00	APBD

Kepala Bidang Lalu Lintas
Dinas Perhubungan Kota Cirebon



H. GUNAWAN, ATD, DEA
NIP. 19680522 199203 1 002

Cirebon, Oktober 2020

Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas
Dinas Perhubungan Kota Cirebon



SETIJO HERMAWAN, SE
NIP. 19711224 199503 1 005



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASEP SUDRAJAT, S.Sos
Jabatan : KEPALA SEKSI REKAYASA LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. GUNAWAN, ATD, DEA
Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIREBON

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. GUNAWAN, ATD, DEA
NIP. 19680522 199203 1 002

Cirebon, Oktober 2020

Pihak Pertama,

ASEP SUDRAJAT, S.Sos
NIP. 19780619 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

SEKSI REKAYASA LALU LINTAS

DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Perbaikan Lampu Isyarat Pengatur Lalu Lintas (Traffic Light)	Berfungsinya traffic light untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	3 paket

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perbaikan Lampu Isyarat Pengatur Lalu Lintas (Traffic Light)	Rp. 135.800.000,00	APBD

Kepala Bidang Lalu Lintas
Dinas Perhubungan Kota Cirebon



H. GUNAWAN, ATD, DEA
NIP. 19680522 199203 1 002

Cirebon, Oktober 2020

Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas
Dinas Perhubungan Kota Cirebon



ASEP SUDRAJAT, S.Sos
NIP. 19780619 200012 1 002



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DODI ROCHDIAT, AMKL
Jabatan : KEPALA UPT PENERANGAN JALAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. ANDI ARMAWAN
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

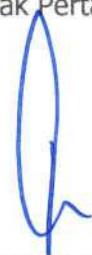
Pihak Kedua,



Drs. ANDI ARMAWAN
NIP. 19691214 199003 1 005

Cirebon, Oktober 2020

Pihak Pertama,



DODI ROCHDIAT, AMKL
NIP. 19630105 198401 1 003

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
UPT PENERANGAN JALAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Rambu yg disediakan / jumlah rambu yg dibutuhkan (standar) x 100 %	85%
		Jumlah ApiLL disediakan / jumlah APILL yg dibutuhkan (standar) x 100 %	85%
		Jumlah PJU yg disediakan / jumlah PJU yg dibutuhkan (standar) x 100 %	85%
2	Peningkatan Pelayanan UPTD	Tersedianya sarana dan prasarana UPTD	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pemeliharaan PJU	Rp. 981.807.000,00	APBD
2	Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Umum	Rp. 139.188.000,00	APBD

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Cirebon


Drs. ANDI ARMAWAN
 NIP. 19691214 199003 1 005

Cirebon, Oktober 2020
 Kepala UPT Penerangan Jalan Umum
 Dinas Perhubungan Kota Cirebon


DODI ROCHDIAT, AMKL
 NIP. 19630105 198401 1 003



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SURYA AGUNG HERMAWAN, ST., M.T
Jabatan : KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. ANDI ARMAWAN
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. ANDI ARMAWAN
NIP. 19691214 199003 1 005

Cirebon, Oktober 2020

Pihak Pertama,

SURYA AGUNG HERMAWAN, ST., M.T
NIP. 19770421 201001 1 004

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tercapainya standarisasi alat uji kendaraan bermotor	100 %
2	Peningkatan Pelayanan UPTD	Tersedianya sarana dan prasarana UPTD	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 25.000.000,00	APBD
2	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 470.350.000,00	APBD

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Cirebon

Drs. ANDI ARMAWAN
NIP. 19691214 199003 1 005

Cirebon, Oktober 2020

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan Kota Cirebon

SURYA AGUNG HERMAWAN, ST., M.T
NIP. 19770421 201001 1 004



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD MUSAPA, SE.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SURYA AGUNG HERMAWAN, ST., M.T
Jabatan : KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cirebon, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SURYA AGUNG HERMAWAN, ST., M.T
NIP. 19770421 201001 1 004

AHMAD MUSAPA, SE.
NIP. 19840407 200902 1 002

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Berfungsinya kestabilan dan akurasi alat uji kendaraan bermotor sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	100 persen
2	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya barang cetakan, bahan baku bangunan dan BBM	1 tahun

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 25.000.000,00	APBD
2	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 470.350.000,00	APBD

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan Kota Cirebon



SURYA AGUNG HERMAWAN, ST., M.T
NIP. 19770421 201001 1 004

Cirebon, Oktober 2020

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT
Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan Kota Cirebon



AHMAD MUSAPA, SE.
NIP. 19840407 200902 1 002



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUGIHARTO AJIE, S.Kom.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENERANGAN
JALAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : DODI ROCHDIAT, AMKL
Jabatan : KEPALA UPT PENERANGAN JALAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DODI ROCHDIAT, AMKL
NIP. 19630105 198401 1 003

Cirebon, Oktober 2020

Pihak Pertama,

SUGIHARTO AJIE, S.Kom.
NIP. 19810425 200902 1 002

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENERANGAN JALAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Pemeliharaan PJU	Terwujudnya PJU yang berfungsi secara keseluruhan	6.589 titik
2	Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Umum	Terselenggaranya operasional pelayanan UPT PJU	1 tahun

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pemeliharaan PJU	Rp. 981.807.000,00	APBD
2	Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Umum	Rp. 139.188.000,00	APBD

Kepala UPT Penerangan Jalan Umum
Dinas Perhubungan Kota Cirebon



DODI ROCHDIAT, AMKL
NIP. 19630105 198401 1 003

Cirebon, Oktober 2020
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Penerangan Jalan Umum
Dinas Perhubungan Kota Cirebon



SUGIHARTO AJIE, S.Kom.
NIP. 19810425 200902 1 002



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS GUMELAR, SE
Jabatan : KEPALA UPT PARKIR DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. ANDI ARMAWAN
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. ANDI ARMAWAN
NIP. 19691214 199003 1 005

Cirebon, Oktober 2020

Pihak Pertama,

AGUS GUMELAR, SE
NIP. 19700404 199703 1 006

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

UPT PARKIR

DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Pelayanan Parkir	Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi Parkir	77,11 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Perparkiran	Rp. 300.000.000,00	APBD

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Cirebon

Drs. ANDI ARMAWAN
NIP. 19691214 199003 1 005

Cirebon, Oktober 2020

Kepala UPT Parkir
Dinas Perhubungan Kota Cirebon

AGUS GUMELAR, SE
NIP. 19700404 199703 1 006



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUSUF, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PARKIR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : AGUS GUMELAR, SE
Jabatan : KEPALA UPT PARKIR DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AGUS GUMELAR, SE
NIP. 19700404 199703 1 006

Cirebon, Oktober 2020
Pihak Pertama,

YUSUF, SE
NIP. 19810420 201001 1004

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PARKIR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Perparkiran	Terselenggaranya pelayanan unit pelayanan teknis perparkiran yang optimal	1 tahun

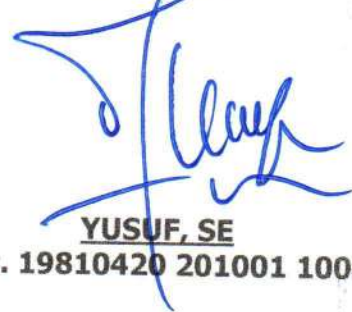
No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Perparkiran	Rp. 300.000.000,00	APBD

Kepala UPT Parkir
Dinas Perhubungan Kota Cirebon



AGUS GUMELAR, SE
NIP. 19700404 199703 1 006

Cirebon, Oktober 2020
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Parkir
Dinas Perhubungan Kota Cirebon



YUSUF, SE
NIP. 19810420 201001 1004